



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NASRULLAH
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 272857

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/252 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 409.500.000

1. MOTOR, BENELLI BS 200 RT MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MICRO/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA PCX SCOOTER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, BENELLI BS 200 RT MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOBIL, TOYOTA MICRO/MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. MOTOR, HONDA BEAT SCOOTER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	440.221.282
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.199.721.282
III. HUTANG	Rp.	2.733.285.189
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.466.436.093

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.